

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan sosial (Bappenas, 1999). Tujuan pembangunan adalah untuk menjadikan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Arsyad (2010) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat mencerminkan adanya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Todaro, 2004).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki masalah mengenai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (Tambunan, 2001). Provinsi Indonesia yang terbagi menjadi 34 provinsi memiliki karakteristik antar wilayah berbeda sehingga pengaruh dalam terciptanya suatu pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman pembangunan ekonomi berpengaruh pada daerah yang mampu tumbuh dengan cepat sementara daerah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh tersebut dapat menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan (disparitas) pendapatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang. Sjafrizal (2009) mengemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal, antara lain: perbedaan

potensi daerah yang sangat besar, kondisi demografis dan ketenagakerjaan, serta kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu, kurang lancarnya mobilitas antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional. Pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang, akibatnya kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia mengklaim bahwa hanya 20 persen populasi terkaya di Indonesia yang menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi selama satu dekade, yang menyiratkan bahwa 80 persen populasi (atau 200 juta orang secara absolut) dibiarkan dibelakang. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia terutama dalam upaya program pembangunan ekonomi. BPS (2019) mengatakan sejak tahun 2015 angka ketimpangan di Indonesia terus menurun secara nasional, meski selama periode 2012 hingga September 2014 angka rasio gini Indonesia cenderung fluktuatif. Sementara, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Indonesia sebesar 17,71 persen. Artinya, pengeluaran penduduk pada tahun 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Adapun jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah sebesar 16,93 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang.

Alat ukur atau media yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini Rasio (IGR). Selanjutnya, IGR digunakan oleh Bank Dunia sebagai cara perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan antar negara-negara di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan IGR untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Studi ketimpangan distribusi pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kuznets pada tahun 1955, alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah IGR yang dibantu dengan menggunakan *Lorentz curve* (Todaro, 2000). Di Indonesia upaya dalam mengukur permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan IGR relatif berhasil. Provinsi di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda

dalam mencapai pembangunan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan, setidaknya terdapat dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2018) bahwa laju pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia menurut harga kostan 2010 selama periode tahun 2015-2018 cenderung berfluktuasi. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, dengan IGR, pada September tahun 2015 mencapai 0,402 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,384. Walaupun demikian, menurut Michael Todaro (2004) seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa, jika nilai IGR terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang, apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Terkait dengan kondisi tersebut, data memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2015 sebesar 28513,57 ribu jiwa dan menurun pada tahun 2018 menjadi 25674,58 ribu jiwa. Walaupun secara angka mengalami penurunan, tetapi secara absolut jumlah tersebut masih relatif besar. Menurut studi empiris yang dilakukan oleh Suharyadi *et al* (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor industri, walaupun memberikan kontribusi relatif besar terhadap pembentukan PDB Indonesia, tetapi dampak terhadap pengurangan kemiskinan relatif kecil. Kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan berasal dari sektor jasa. Ketimpangan di daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar. Provinsi di Indonesia yang mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan implikasi tingkat kesejahteraan masyarakat pada provinsi yang bersangkutan. Oleh karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi

kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar tidak terjadi disparitas dalam tingkat kesejahteraan masyarakat antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Analisis regresi panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Data panel sendiri merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* diamati secara berkala pada interval waktu yang sama. Penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan antara lain memungkinkan jumlah data meningkat sehingga mengurangi multikolinieritas antar variabel prediktor, datanya lebih bervariasi dan dapat mengurangi masalah yang muncul apabila ada variabel yang dihilangkan, selain itu juga dapat mengontrol heterogenitas individu (Hsiao, 2003). Untuk mengestimasi parameter model regresi panel terdapat tiga cara pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Mátyás & Sevestre, 2008). *Common effect model* mengasumsikan bahwa intersep disetiap daerah sama, namun kenyataannya disetiap daerah berbeda. Selanjutnya, mengalami perkembangan menjadi *fixed effect model* yang mempunyai intersep berbeda disetiap daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat variabel prediktor lain yang tidak teramati secara langsung tetapi berpengaruh acak terhadap IGR, sehingga *fixed effect model* mengalami perluasan menjadi *random effect model*.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan antara lain, Dondo *et al* (2019) menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin, dan IPM terhadap nilai IGR sebagai alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan regresi linier berganda, hasilnya menunjukkan bahwa yang memberikan pengaruh secara signifikan adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada variabel penduduk miskin dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Nanda (2013) menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menguji pengaruh PDRB per kapita terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan, hasilnya menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan atau IGR. Selanjutnya Damanik *et al* (2018) melakukan penelitian menggunakan metode analisis jalur dengan variabel yang berpengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dondo *et al* (2019) dan Nanda (2013) menggunakan data *cross section*, sehingga tidak dapat mengetahui perbedaan karakteristik variabel respon pada setiap daerah maupun perubahan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Faktanya nilai IGR setiap tahun mengalami perubahan dan di setiap daerah berbeda, hal ini ditandai dengan adanya *fixed effect* karena pada umumnya intersep merupakan efek group/individu dari unit *cross section* yang bernilai konstan sepanjang waktu t atau bahkan berbeda-beda disetiap daerah. Selanjutnya *fixed effect* mengalami perluasan menjadi *random effect*. Pada *random effect* diasumsikan bahwa terdapat variabel prediktor lain yang tidak teramati secara langsung tetapi berpengaruh acak terhadap IGR (Mátyás & Sevestre, 2008). Data menunjukkan bahwa pada provinsi Riau IGR pada tahun 2015 sebesar 0,366 namun mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,347 kemudian pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 0,325. Beberapa provinsi lainnya IGR selama periode tahun 2015-2018 mengalami peningkatan maupun penurunan. Berdasarkan fakta tersebut penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan regresi data panel untuk memodelkan IGR berdasarkan provinsi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data IGR berdasarkan provinsi di Indonesia sebagai variabel respon, sedangkan variabel prediktornya adalah Produk Domestik Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk miskin dan investasi. Hasil pemodelan yang didapat diharapkan dapat mengidentifikasi faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia untuk mengatasi masalah kesenjangan distribusi pendapatan, dengan harapan agar tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mendeskripsikan variabel penelitian yang terkait IGR sebagai alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia ?
2. Bagaimana memodelkan IGR di Indonesia menggunakan regresi panel dengan *commont effect*, *fixed effect*, dan *random effect* ?
3. Bagaimana menganalisis dan menginterpretasi model regresi panel yang sesuai dengan data IGR di Indonesia ?

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan variabel penelitian yang terkait indeks Gini rasio sebagai alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan *software* Microsoft Excel.
2. Memodelkan indeks Gini Rasio di Indonesia menggunakan regresi panel dengan *commont effect*, *fixed effect*, dan *random effect* menggunakan *software* Eviews 10.
3. Menganalisis dan menginterpretasi model regresi panel yang sesuai berdasarkan kriteria mean square error terkecil dan koefisien determinasi terbesar pada data indeks Gini Rasio di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Mahasiswa
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan ilmu statistika khususnya pada model regresi data panel di bidang sosial dan ekonomi
2. Manfaat bagi Pemerintah
Sebagai salah satu acuan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata
3. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IGR di Indonesia

1.5 Batasan masalah

Batasan yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang digunakan bukan publikasi tahun terbaru melainkan tahun 2015 sampai dengan 2018 dikarenakan data terbaru yang tersedia pada publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia mengenai PDRB per kapita harga konstan 2010 berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hanya sampai dengan tahun 2018 dan model yang dibahas pada penelitian ini menggunakan efek individu.